

OPTIMALISASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM SILA KELIMA PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KESENJANGAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Intan Nuraini¹, Engga Alwi Shihab Alzubair², Davina Safa Felisha³, Alvin Maulana⁴, Day Ramadhani Amir⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IKIP PGRI Bojonegoro, Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62114

Email : 976intan.aini@gmail.com¹, easa.alwi@gmail.com², davinafelisha70@gmail.com³, alvinmaulana270324@gmail.com⁴, day.ramadhani@ikipgribojonegoro.ac.id⁵

Abstrak

Prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima Pancasila merupakan hal yang penting dan seharusnya dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan nilai keadilan sosial yang ada dalam sila kelima Pancasila dapat berfungsi sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan dalam akses serta kualitas pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur yang melibatkan berbagai artikel ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi yang terkait. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendidikan di Indonesia masih sangat signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat dengan ekonomi tinggi dan rendah. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengharuskan adanya distribusi sumber daya pendidikan yang adil, serta memerlukan kebijakan afirmatif untuk mendukung kelompok yang rentan, dan peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada prinsip keadilan substantif, sebagai bentuk nyata dari penerapan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pancasila, keadilan sosial, kesenjangan pendidikan, akses Pendidikan.

Abstract

The principle of social justice contained in the fifth precept of Pancasila is important and should be used as the basis for public policy making, including in the education sector. The purpose of this article is to explore how the application of the value of social justice found in the fifth precept of Pancasila can serve as a strategy to reduce disparities in access to and quality of education in Indonesia. The approach used in this research is through a literature study involving various scholarly articles, government policies, and related official documents. The findings of this study show that inequality in education in Indonesia is still very significant, especially between urban and rural areas, as well as between high and low economic groups. The value of social justice in Pancasila requires a fair distribution of education resources, affirmative policies to support vulnerable groups, and an overall improvement in the quality of education. This study recommends that policies taken should favor the principle of substantive justice, as a real form of applying the values of Pancasila in the national education system.

Keywords: Pancasila, social justice, educational inequality, education acces.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.. Meskipun demikian, perbedaan dalam akses dan mutu pendidikan masih menjadi masalah besar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak studi mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan edukasi yang besar antara wilayah kota dan desa, serta

antara kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi dan rendah (Kurniawan, 2021: 45). Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya memperlebar jurang sosial dan ekonomi di masyarakat.

Sila kelima Pancasila, yang menyatakan 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pendidikan yang mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Keadilan sosial tidak hanya mencakup kesetaraan dalam hukum, tetapi juga lebih menekankan pada keadilan yang substansial, yaitu menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing (Sutrisno, 2018: 12).

Belajar adalah upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Mempelajari kualitas warga dapat memengaruhi kemajuan suatu negara. Kualitas pembelajaran tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga kombinasi dari semua keterampilan manusia yang mencakup kemampuan kognitif, emosional, dan psikomotorik. Negara dengan kepribadian yang kuat dapat menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh negara lain. Karena itu, pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila berperan sebagai sarana untuk membentuk generasi bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan ini, generasi tersebut dapat menjauhkan diri dari tindakan kekerasan dan menghentikannya dengan cara yang bijaksana dan damai (Aryani et al., 2022).

Pemerintah telah berupaya melalui berbagai kebijakan afirmatif seperti program Indonesia Pintar, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan kebijakan zonasi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai keadilan sosial di bidang pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis cara nilai keadilan sosial yang terdapat dalam sila kelima Pancasila dapat dimaksimalkan untuk strategi mengurangi kesenjangan dalam akses serta kualitas pendidikan di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada kajian literatur. Sumber data diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal baik nasional maupun internasional, dokumen kebijakan dari pemerintah, dan juga laporan riset pendidikan yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024. Pencarian sumber literatur dilakukan dengan memanfaatkan platform Google Scholar

dengan menggunakan kata kunci seperti ‘kesenjangan pendidikan di Indonesia’, ‘keadilan sosial Pancasila’, serta ‘akses pendidikan’. Artikel yang dipertimbangkan harus membahas tentang perbedaan akses dan kualitas pendidikan serta pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.

Setelah semua literatur terkumpul, analisis tematik dilakukan terhadap konten setiap dokumen. Langkah-langkah analisis terdiri dari menemukan tema, mengkategorikan informasi berdasarkan isu utama (akses pendidikan, kualitas pendidikan, kebijakan afirmatif, dan keadilan sosial), dan menyimpulkan hasil temuan. Kemudian, data dan hasil analisis dievaluasi dalam kerangka penerapan sila kelima dari Pancasila dalam sektor pendidikan guna mengatasi ketimpangan yang ada.

Menurut Rukminingsih et al. (2020), Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif dengan rancangan kajian kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan untuk memberi peneliti kesempatan memahami fenomena secara mendalam di dalam konteks yang alami. Studi kasus dipilih agar dapat menggali secara mendalam satu unit tertentu, seperti individu, kelompok, atau lembaga, yang berkaitan dengan isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa perbedaan pendidikan di Indonesia masih ada dalam dua bidang utama, yaitu akses dan kualitas. Akses pendidikan masih banyak terdapat di daerah perkotaan, sementara wilayah terbelakang, terdepan, dan terluar (3T) mengalami kekurangan dalam infrastruktur, tenaga pengajar, dan sarana belajar. Menurut laporan Kemendikbud (2021), Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMA di perkotaan mencapai 78,2%, tetapi di daerah 3T hanya 56,4%.

Menurut Wijayati, Damanik, dan Prawirosastro (2025), keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan jumlah tenaga pengajar, serta kebijakan yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kualitas pendidikan juga menunjukkan ketidaksetaraan. Hasil dari penilaian nasional menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dalam skor kemampuan membaca dan matematika antara sekolah-sekolah yang berada di kota dan yang ada di desa. Dalam konteks ini, nilai-nilai keadilan sosial yang ada dalam sila kelima Pancasila menjadi dasar penting dalam pembuatan kebijakan afirmatif. Beberapa tindakan seperti pendistribusian dana BOS afirmasi dan pengiriman guru ke daerah-daerah terpencil adalah langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan ini.

Contoh konkret dari ketimpangan akses pendidikan dapat dilihat di Papua, di mana lebih dari 690.000 anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan formal (Basanda et al., 2024). Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan geografis, minimnya infrastruktur pendidikan, dan kurangnya guru berkualitas. Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang telah diuji coba di beberapa daerah seperti Sorong Selatan terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan. Namun, tantangan besar masih ada dalam hal distribusi anggaran pendidikan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Wahyudi et al. (2021) mencatat bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata, dengan ketidaksetaraan yang jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, pelatihan untuk guru, dan fasilitas pendidikan, berkontribusi pada ketidakseimbangan ini. Lebih lanjut, nilai keadilan sosial dalam Pancasila menekankan pada keadilan substantif, yaitu perlakuan yang adil berdasarkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang kurang mampu agar tercipta kesetaraan. Sejumlah studi (Lestari et al., 2022; Basanda et al., 2024) telah menunjukkan bahwa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dapat membentuk karakter siswa yang peduli terhadap orang lain dan meningkatkan rasa saling mendukung di antara mereka.

Penelitian oleh Putri et al. (2024) mengungkapkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum lewat Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka dapat membentuk karakter siswa yang adil secara sosial. Menggabungkan nilai-nilai ini dalam proses pembelajaran mendukung siswa untuk mengerti dan menerapkan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai keadilan sosial dalam pendidikan juga harus mempertimbangkan perspektif inklusif terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak dari keluarga miskin, serta mereka yang tinggal di daerah konflik atau rawan bencana. Kebijakan yang responsif terhadap keberagaman ini akan memperkuat fungsi pendidikan sebagai alat pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, serta memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Lebih jauh, Setiap lembaga pendidikan perlu menjadikan Pancasila lebih dari sekadar materi ajar. Ini harus menjadi nilai yang diterapkan dalam budaya di sekolah. Dengan mengedepankan solidaritas, empati, dan kerja sama, budaya sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang berkualitas dan penuh makna. Pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu dirancang bukan sebagai dogma, melainkan sebagai praktik hidup yang relevan dan kontekstual bagi peserta didik di era modern (Asrori, 2017).

Umayah dan Estiningjati (2024) menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pendidikan sangat krusial untuk memperbaiki kemampuan membaca dan menghitung di tingkat sekolah dasar. Integrasi teknologi yang tepat dapat memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan siswa. Ngan Sui-Ni (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas demi mencapai Visi Indonesia 2045. Untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan, kerjasama yang solid antara kedua pihak ini sangat diperlukan.

Oleh karena itu, pengoptimalan nilai keadilan sosial sebagai pedoman dalam kebijakan pendidikan sangat penting, tidak hanya untuk mengurangi kesenjangan tetapi juga untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Aqiilah dan Najicha (2023) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa Sila Kelima Pancasila menyoroti betapa pentingnya distribusi kekayaan, pemerataan, dan memberikan peluang yang adil kepada seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan sosial seperti subsidi pendidikan dan akses layanan publik, yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan. Mereka juga menemukan bahwa implementasi keadilan sosial masih menghadapi tantangan besar, seperti ketimpangan akses layanan dasar, birokrasi yang lambat, serta lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Peranan seorang guru sangat penting dalam menyatukan nilai-nilai Pancasila, terutama sila lima, dalam pendidikan yang bermakna. Seorang guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dalam pengembangan karakter, penyusun kurikulum yang relevan, dan penilai pembelajaran secara menyeluruh. Guru yang mampu menanamkan nilai-nilai keadilan sosial secara konsisten, melalui sikap dan metode pembelajarannya, berkontribusi langsung dalam pembentukan peserta didik yang sadar hak dan tanggung jawab sosialnya. Penelitian oleh Agusta, Muttaqin, dan Hidayat (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter sangat bergantung pada konsistensi guru dalam menjadi teladan nilai-nilai Pancasila, serta kemampuan mereka membentuk budaya sekolah yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, implementasi sila kelima tidak cukup diwujudkan dalam bentuk materi ajar, tetapi harus tertanam dalam seluruh aspek lingkungan belajar.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam akses serta kualitas pendidikan di Indonesia masih merupakan masalah besar, khususnya di wilayah 3T dan di antara kelompok

ekonomi yang kurang mampu. Menerapkan prinsip keadilan sosial dari sila kelima Pancasila bisa menjadi strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Prinsip ini mengharuskan pemerataan sumber daya pendidikan, kebijakan afirmatif, dan perhatian lebih kepada kelompok marginal.

Pemerintah harus menyusun kebijakan pendidikan yang lebih fokus pada keadilan yang nyata dengan memperhatikan situasi sosial-ekonomi para peserta didik dan memastikan distribusi pendidikan yang merata. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan tidak hanya akan memperkuat keadilan sosial, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan bangsa untuk mendidik seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan zonasi berbasis kebutuhan, memperluas program digitalisasi sekolah di wilayah 3T, serta mengadopsi indikator keadilan sosial sebagai salah satu parameter dalam evaluasi mutu pendidikan nasional.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menjamin bahwa kebijakan pendidikan yang adil dapat diterapkan dengan baik. Pemerintah daerah harus mendapatkan kebebasan dan dukungan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan tepat. Peran organisasi masyarakat dan institusi pendidikan juga sangat krusial untuk mengawasi dan memastikan bahwa prinsip keadilan sosial diterapkan dengan efektif di lapangan.

Lebih lanjut, pendidikan yang adil tidak hanya melibatkan akses dan kualitas, tetapi juga mengenai isi kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya serta kebutuhan siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima, harus dijadikan dasar utama dalam membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, fleksibel, dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G., & Latief, M. A. (2020). Metode penelitian pendidikan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas. Erhaka Utama.
- Agusta, R. M., Muttaqin, A., & Hidayat, S. (2024). PERAN GURU DALAM MENINTEGRASIKAN FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 284-297.
- Aqilah, I. N., & Najicha, F. U. (2023). Peran Keadilan Sosial Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial: Evaluasi Terhadap Realisasi Sila Kelima Pancasila. *Researchgate, Surakarta: Desember*.
- Aryani, E. D., Fadjarin, N., Azzahro, T. A., & Fitrono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. *Gema Keadilan*, 9(3), 186-198.

-
- Asrori, M. A. R. (2017). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter dan budaya bangsa yang berbasis pada lingkungan sekolah. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Basanda, N. F. P., Zahrok, F., Maharani, A. K., Masruroh, N., & Abdullah, A. H. D. (2024). STRATEGI PENERAPAN SILA KELIMA PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN BERKEADILAN: STUDI KASUS ANAK TIDAK SEKOLAH DI PAPUA. *Lentera Ilmu*, 18-25.
- Estiningjati, W., Umayah, U., Budiarti, W. N., Riwanto, M. A., Dwiyantri, A. N., Winandika, G., & Wulandari, M. P. (2024, November). Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Numerasi di SD dan Menciptakan Kurikulum Merdeka Yang Berkualitas. In *Prosiding Seminar Nasional PGSD UST* (Vol. 5, No. 1, pp. 211-225).
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2020). Implementasi nilai-nilai pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130-144.
- Makmur, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Tantangan Hukum Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 1-17.
- Putri, R. T. U., Kristanto, A., Karwanto, K., Roesminingsih, E., & Hariyati, N. (2024). Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. *Journal of Education Research*, 5(3), 2523-2529.
- Ria, U. A. (2021). Penerapan Sila Kelima Pancasila Dalam Membentuk Sikap Peduli Sosial Bagi Siswa SDN Kaligunting 01 Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Sui-Ni, N. (2023). Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyediakan Pendidikan Dasar Bermutu untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045. *arXiv preprint arXiv:2302.12837*.
- Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., & Hasyim, M. N. (2022). Mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(1), 18-22.
- Wijayati, I. W., Damanik, F. H. S., & Prawirosastro, C. L. (2025). Kesenjangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Analisis Kebijakan dan Alternatif Solusi. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543, 6(3), 671-677.